

Bab 2

KERANGKA TEORITIS

2.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.1.1. Sejarah dan Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Isu tanggung jawab sosial perusahaan yang berkembang pesat saat ini mulai muncul pada abad 19. Menurut Effendi (2008), kemunculan tanggung jawab sosial perusahaan adalah sebagai reaksi terhadap pertumbuhan kapitalisme yang pesat selama tiga puluh tahun setelah perang sipil. Istilah CSR muncul ketika Ida Minerva Tarbell (1857-1944) mempublikasikan sekumpulan artikel dalam *McClure's Magazine* yang mengkritik metode yang digunakan oleh John D. Rockefeller untuk menciptakan monopoli di industri minyak Amerika Serikat. Publikasi tersebut mengundang intervensi Presiden Amerika Serikat, Teddy Roosevelt, dan berakhir dengan keputusan melawan *Rockefeller's Standard Oil Corporation* di *US Supreme Court*.

Sementara itu, menurut Wibisono (2007), berbagai kalangan menyebutkan bahwa era modern dari tanggung jawab sosial dimulai pada tahun 1950-an. Pemikiran tersebut muncul sebagai respon atas terbitnya buku berjudul *Social Responsibilities of the Businessman* karya Howard R. Bowen (1953), yang dianggap sebagai literatur awal tanggung jawab sosial era modern. Sehingga Bowen pun dijuluki sebagai "Bapak CSR".

Selain itu, buku karya Rachel Carson yang berjudul "Silent Spring" juga ikut meramaikan isu tanggung jawab sosial perusahaan (Wibisono, 2007). Buku tersebut bercerita tentang persoalan lingkungan dalam lingkup global. Dalam buku tersebut penulis mengingatkan kepada masyarakat dunia tentang bahaya pestisida bagi lingkungan dan kehidupan.

Isu tanggung jawab sosial juga semakin berkembang dengan munculnya tulisan berjudul "The Future Capitalism" karya Lester Thurow pada tahun 1966 dan "The Limits to Growth" yang ditulis pada tahun 1970 karya cendekiawan-cendekiawan dunia yang tergabung dalam *Club of Rome* (Wibisono, 2007). Dalam karyanya Thurow menyatakan bahwa kapitalisme tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan lingkungan. Sementara "The Limits to Growth" mengingatkan masyarakat dunia bahwa eksploitasi alam harus dilakukan dengan hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan karena bumi mempunyai keterbatasan daya dukung.

Wibisono (2007) juga menyatakan bahwa sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan kedermwanaan perusahaan terus berkembang dalam kemasan *philanthropy* serta *Community Development*. Sehingga bermunculanlah berbagai program kedermwanaan, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan berbagai kegiatan sejenis.

Konsep *philanthropy* mulai ditinggalkan dan bergeser ke arah *Community Development* semenjak tahun 1980-an (Wibisono, 2007). Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan yang mulai mengembangkan program pemberdayaan masyarakat seperti pengadaan berbagai pelatihan dan keterampilan untuk masyarakat, pengembangan kerjasama, dan berbagai kegiatan sejenis lainnya.

Semenjak tahun 1990-an berbagai pendekatan bermunculan, seperti pendekatan integral, pendekatan *stakeholder* dan pendekatan *civil society*, dan mempengaruhi praktek *community development* (Wibisono, 2007).

Isu tanggung jawab sosial perusahaan dalam lingkup global semakin menjadi perbincangan semenjak tahun 1990-an. Pada tahun 1992, KTT Bumi (Earth Summit) diadakan di Rio de Janeiro, Brazil. KTT tersebut menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang harus dilaksanakan (Wibisono, 2007).

Pada tahun 1997, John Elkington menulis buku yang berjudul "Cannibals with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentith Century Business". Buku tersebut menjelaskan tentang konsep "3P" yang menjadi topik yang sangat penting dalam tanggung jawab sosial. Dalam bukunya Elkington berpendapat bahwa jika perusahaan ingin *sustain*, maka ia perlu memperhatikan 3P, yaitu, bukan hanya memaksimalkan keuntungan (*profit*), namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Wibisono, 2007). Dan, isu tanggung jawab sosial perusahaan pun semakin menjadi perhatian setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan.

2.1.2. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Beberapa definisi tanggung jawab sosial perusahaan:

1. World Bank

Lembaga keuangan ini mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai “the commitment of business to contribute to sustainable to economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development.” (Wibisono, 2007)

2. The World Business Council for Sustainable Development

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut lembaga internasional ini adalah “komitmen dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.” (Raman, 2006)

3. European Commission (2001)

European Commission mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai “suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan permasalahan sosial dan lingkungan dalam interaksinya dengan pemangku kepentingan secara sukarela.” (Fiori, Donato, & Izzo, 2007).

4. European Union (EU Green Paper)

European Union mengemukakan bahwa “CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment.” (Wibisono, 2007)

5. UNCTAD

The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai “concerning essentially ‘how business enterprises relate to, and impact upon, a society's needs and goals’.” (Monica, 2007)

6. FCGI

Menurut organisasi ini, tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagaimana suatu perusahaan dapat menjalankan nilai dan kegiatan sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) bagi perusahaan (Monica, 2007)

2.1.3. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Konsep Tanggung jawab sosial perusahaan sangat erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan, menurut Wibisono (2007), mulai berkembang dan populer semenjak diterbitkannya buku karya Rachel Carson pada tahun 1960-an yang mewacanakan persoalan lingkungan dalam lingkup global untuk pertama kalinya. Buku tersebut berjudul “Silent Spring”.

Konsep pembangunan berkelanjutan, atau lebih dikenal dengan istilah *sustainable development*, mengemukakan bahwa pembangunan haruslah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan (Efendi, 2008).

Darwin (2006) mengungkapkan bahwa dalam “Report of the World Commission for Environment and development” ditegaskan bahwa :

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” (the Brundtland Report, 1987).

Jadi, secara sederhana, pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kemampuannya.

Konsep ini muncul sebagai akibat dari keputusan perusahaan di masa sekarang yang akan mempunyai implikasi di masa mendatang (Wardhani, 2007). Sehingga, perusahaan seharusnya memperhitungkan setiap dampak dari tindakan dan keputusan yang diambil. Ketika tanggung jawab sosial perusahaan terintegrasi dengan keputusan bisnis perusahaan dan diimplementasikan dengan baik, dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan tercapai, maka pembangunan berkelanjutan pun akan tercapai.

Secara konseptual, konsep ini dapat dipecah menjadi tiga dimensi, yaitu (Wilenius, 2005; Wardhani, 2007):

1. Kinerja ekonomi, seperti laba yang kuat bagi pemilik perusahaan, aturan akuntansi yang dapat diandalkan, penambahan staf dan pembayaran pajak.
2. Akuntabilitas sosial, seperti kondisi tempat kerja, dan kontrol kualitas sosial pembelian.
3. Manajemen lingkungan, seperti konsumsi listrik, emisi gas karbondioksida, atau jumlah material yang masuk ke perusahaan.

Tiga dimensi ini dikenal dengan sebutan "Triple Bottom Line", yang dipopulerkan oleh Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul "Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century". Gagasan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansial saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya (Wibisono, 2007). Tiga dimensi ini dapat menjadi alat untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pemeliharaan lingkungan.

Seperti telah dijelaskan bahwa semenjak terbitnya buku berjudul "Silent Spring", perhatian terhadap masalah lingkungan pun semakin berkembang dan ikut mempengaruhi perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan. Perhatian tersebut diwujudkan dalam berbagai konferensi Internasional, antara lain (Wibisono, 2007):

1. Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm

Konferensi yang lebih dikenal dengan nama *United Nations Conference of Human Environment* (UNCHE) ini diselenggarakan oleh PBB di Stockholm Swedia pada tahun 1972. Hari pembukaan konferensi ini kemudian ditetapkan sebagai "Hari Lingkungan Hidup Sedunia". Konferensi ini pun melahirkan *United Nations Environmental Programme* (UNEP), badan khusus PBB untuk masalah lingkungan, yang kemudian berkedudukan di Nairobi, Kenya.

Kenudian pada tahun 1983 PBB membentuk *World Commission on Environment and Development* (WECD), Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, yang kemudian berhasil menerbitkan laporan yang

berjudul “Our Common Future” dengan tema *Sustainable Development*. Laporan ini selanjutnya lebih dikenal dengan “Laporan Bruntland”. Dalam laporan tersebut muncul wacana dan pendefinisian dari pembangunan berkelanjutan.

2. KTT Bumi di Rio de Janeiro

Konferensi yang lebih dikenal dengan sebutan *Earth Summit* ini diselenggarakan oleh PBB di Rio de Janeiro pada 3-14 Juni 1992. KTT ini mengusung slogan yang berbunyi “Think globally, act locally”, yang kemudian menjadi populer untuk mengekspresikan keinginan berlaku ramah terhadap lingkungan.

Konferensi ini menghasilkan kesepakatan di antara para pemimpin dunia untuk mengkompromikan berbagai rencana besar terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial.

3. KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg

World Summit on Sustainable Development (WSSD) yang diprakarsai oleh PBB, diselenggarakan pada 22 Agustus – 6 September 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Konferensi ini juga dikenal dengan Rio+10, yang menghasilkan tiga dokumen yaitu: Deklarasi Johannesburg untuk Pembangunan Berkelanjutan (Johannesburg Declaration for Sustainable Development), yang berisi tantangan dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan; Rencana Implementasi (Plan of Implementation), yang berisi upaya-upaya yang harus dilakukan berdasarkan prinsip bersama tapi dengan tanggung jawab yang berbeda, yang mengintegrasikan elemen ekonomi,

ekologi, dan sosial yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik; dan Dokumen Kerjasama (Partnership) yang dikenal dengan istilah Type II, yang dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan berkelanjutan yang merata secara internasional dengan dukungan dana dari negara-negara maju serta lembaga internasional.

4. COP 3 UNFCCC

Konferensi yang diadakan pihak UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change) untuk yang ketiga kalinya, atau dikenal dengan sebutan COP 3 (Conference of the Parties III) menghasilkan protokol Kyoto. Konferensi ini diselenggarakan di Kyoto, Jepang pada bulan Desember 1997. Protokol tersebut berisi kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah yang akan diambil sehubungan dengan masalah-masalah perubahan iklim.

5. KTT Millenium di New York

KTT yang diselenggarakan pada bulan September tahun 2000 ini menghasilkan *United Millenium Declaration* berupa *Millenium Development Goals/MDGs*. MDGs ini memiliki 8 tujuan dan 18 target yang harus dicapai sebelum 2015. Tujuan MDGs ini antara lain: menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan yang parah; pencapaian pendidikan dasar secara universal; mengembangkan kesetaraan *gender* dan memberdayakan perempuan; mengurangi tingkat kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu; perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; menjamin berlanjutnya pembangunan lingkungan; dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

2.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kinerja Keuangan

Secara umum, pengukuran kinerja keuangan perusahaan, dapat dilakukan dengan dua cara, pengukuran berbasis akuntansi dan pengukuran berbasis pasar saham. Pengukuran mana yang paling tepat untuk mengukur kinerja perusahaan, saat ini masih menjadi perdebatan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk melihat hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian-penelitian tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.⁷

Kelompok penelitian pertama yang menemukan hubungan positif antara CSR dan kinerja perusahaan, antara lain: Pava & Krausz (1996) dan Preston & O'Bannon (1997) menemukan hubungan yang positif antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan, sementara hubungan yang positif antara kinerja perusahaan dan hubungan stakeholder yang baik ditemukan oleh Stanwick and Stanwick (1998) dan oleh Verschoor (1998). Ruf et al. (2001) menemukan bahwa perubahan pada CSR memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan penjualan dan bahwa *return on sales* juga memiliki hubungan yang positif dengan CSR untuk 3 periode keuangan. Simpson & Koher (2002) menemukan hubungan yang positif antara kinerja sosial dan keuangan dengan sampel perusahaan perbankan.

Sementara itu, kelompok kedua menemukan arah yang tidak signifikan dalam hubungan antara CSR dan kinerja perusahaan baik berbasis akuntansi maupun

⁷ Becchetti, Ciciretti, & Hasan. 2007. Corporate Social Responsibility and Shareholder's Value: An Event Study Analysis

berbasis pasar saham. Penelitian ini dilakukan oleh Mc William & Siegel (2001), Freedman and Jaggi (1986) and Aupperle, Carroll and Hatfield (1985).

Dan kelompok ketiga mengungkapkan hubungan negatif antara CSR dan kinerja perusahaan yang konsisten dengan hipotesis oportunisme manajerial. Preston and O'Bannon (1997) menyarankan kepada manajer untuk mengurangi pengeluaran pada kinerja sosial untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek dan kompensasi personal mereka, tetapi ketika kinerja keuangan buruk, mereka mengalihkan perhatian pada pengeluaran program sosial. Penelitian lain yang mendukung hubungan negatif ini antara lain oleh Freedman and Jaggi (1982), Ingram and Frazier (1983), Waddock and Graves (1997).

Accounting-based Performance Measures

Dalam penelitiannya, Stanwick dan Stanwick (1998) melakukan pengukuran terhadap kinerja sosial perusahaan dengan menggunakan *Fortune Corporate Reputation Index*. Sementara untuk kinerja keuangan, pengukuran didasarkan pada profitabilitas. Untuk mengontrol variasi dari ukuran perusahaan, maka profitabilitas dihitung berdasarkan profit tahunan dibagi dengan penjualan tahunan (annual sales). Pemilihan variabel ukuran perusahaan berdasarkan atas saran dari Fombrun and Shanley (1990) serta Cowen, Ferreri and Parker (1987). Dan kinerja lingkungan didasarkan pada level emisi polusi yang dikeluarkan EPA. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 1987-1992.

Penelitian ini pun menghasilkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap tingkat kinerja sosial perusahaan. Perusahaan yang ukurannya lebih besar, memiliki profit yang lebih besar

pula, dengan tingkat emisi yang lebih rendah dan tingkat kinerja sosial perusahaan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kinerja sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan mendorong para manajer perusahaan untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Dan menurut penelitian ini, *Corporate Reputation Index* adalah ukuran yang cukup valid untuk mengukur kinerja sosial perusahaan.

Sementara itu, Aupperle, Carroll dan Hatfield (1985) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara tanggung jawab sosial dan profitabilitas. Carroll mendefinisikan tanggung jawab sosial melalui 4 komponen, yaitu ekonomi, hukum (legal), etis, dan *discretionary* (filantropi):

1. Tanggung jawab ekonomi bisnis mencerminkan kepercayaan bahwa bisnis memiliki kewajiban untuk menjadi produktif dan menghasilkan profit serta memenuhi kebutuhan konsumen.
2. Tanggung jawab hukum dari bisnis mengindikasikan suatu perhatian bahwa tanggung jawab ekonomi dilakukan dalam batasan hukum tertulis.
3. Tanggung jawab etis dari bisnis mencerminkan kode-kode, norma-norma, dan nilai-nilai tidak tertulis yang secara implisit dihasilkan dari masyarakat. Tanggung jawab etis berjalan melebihi kerangka hukum.
4. Tanggung jawab *discretionary* dari bisnis bersifat *volatile* dan filantropi, serta sulit untuk ditetapkan dan dievaluasi.

Karena definisi tersebut, maka tanggung jawab sosial perusahaan pun diukur dengan menggunakan metode survei reputasi. Dan untuk indikator profitabilitasnya, digunakan ROA jangka pendek (1 tahun) dan ROA jangka panjang (5 tahun). Sementara untuk variabel resiko yang digunakan adalah beta yang diperoleh dari *Value Line's Safety Index*. Dan pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara tanggung jawab sosial dan profitabilitas perusahaan.

Ingram & Frazier (1983) melakukan penelitian yang mencoba untuk melihat hubungan antara kinerja keuangan perusahaan berbasis akuntansi dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Ullmann, 1985).

Pengukuran terhadap pengungkapan aktivitas sosial perusahaan menggunakan *content analysis* yang terkomputerisasi terhadap laporan tahunan perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan menggunakan analisis 48 rasio akuntansi. Ingram dan Frazier (1983) juga menggunakan variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan dan distribusi kepemilikan saham.

Dari penelitian mereka didapatkan kesimpulan bahwa pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan memiliki hubungan yang negatif dengan kinerja keuangan berbasis akuntansi.

Market-based Performance Measures

Eksperimen yang dilakukan oleh Milne & Patten (2002) menemukan bahwa pelaporan lingkungan tertentu mempengaruhi persepsi investor dengan melegitimasi aktivitas operasi perusahaan. Penelitian yang dilakukan Blacconiere & Patten (1994) melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan di industri kimia dengan pengungkapan lingkungan yang ekstensif sebelum bencana Bhopal pada tahun 1994 memperlihatkan

reaksi pasar yang negatif yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kurang mengungkapkan isu lingkungannya. Namun penelitian Murray et al (2006) tentang pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan 100 perusahaan teratas di Inggris tidak dapat mendukung hubungan antara imbal hasil pasar (market returns) dan pelaporan sosial dan lingkungan.

Jones, Frost, Loftus, & Van Der Laan (2007) juga melakukan penelitian yang mencoba untuk melihat hubungan antara pengungkapan keberlanjutan perusahaan (sustainability disclosure) dengan kinerja perusahaan yang diwakili oleh *abnormal returns* dan kinerja keuangan yang diwakili oleh rasio-rasio keuangan, pengukuran berbasis posisi kas, aliran kas, modal kerja, profitabilitas, kinerja *earnings, turnover*, struktur keuangan, kapasitas pelayanan hutang, pengeluaran modal, dan *market-to-book value* beserta *price-earning ratio*. Sampel yang digunakan adalah 100 perusahaan yang terdaftar di ASX.

Untuk pengukuran keberlanjutan perusahaan, peneliti melakukan *content analysis* terhadap laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan *website* perusahaan yang diambil pada awal tahun 2004. *Content analysis* yang digunakan berpedoman pada kerangka pengungkapan keberlanjutan yang diakui secara internasional yaitu GRI (2002).

Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya hubungan negatif antara pengungkapan keberlanjutan perusahaan dengan *abnormal returns*. Namun variabel kontrol yang digunakan, yaitu ukuran perusahaan, tidak memiliki dampak utama terhadap hasil ini. Selain itu, pengungkapan keberlanjutan berhubungan positif dengan sejumlah aspek kinerja keuangan perusahaan. Pengungkapan keberlanjutan berhubungan positif dengan tingkat aliran kas operasional terhadap aset total

perusahaan (*operating cashflow to total assets*), modal kerja terhadap aset total (*working capital to total assets*), laba ditahan terhadap aset total (*retained earning to total assets*), *asset backing per share*, kapasitas pelayanan hutang (*debt servicing capacity*), dan modal kerja relatif terhadap aset (*working capital relative to total assets*). Dan pengungkapan keberlanjutan juga berhubungan negatif dengan level sumber daya kas terhadap aset total (*cash resources to total assets*), rasio *price to book value*.

McGuire (1988), juga meneliti hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangannya. Pengukuran tanggung jawab sosial diukur dengan pemeringkatan reputasi perusahaan menggunakan pemeringkatan majalah Fortune. Sedangkan untuk pengukuran kinerja keuangan ia menggunakan kedua basis pengukuran, yaitu pengukuran berbasis akuntansi dan pengukuran berbasis pasar saham. Pengukuran berbasis akuntansi yang digunakan adalah ROA, total aset, pertumbuhan penjualan, pertumbuhan aset, dan pertumbuhan laba operasi. Sedangkan pengukuran berbasis pasar saham yang digunakan adalah *risk-adjusted return* dan *total return*.

Penelitian ini menemukan bahwa baik pengukuran berbasis akuntansi maupun berbasis pasar saham untuk periode pencatatan sekarang berhubungan erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan periode pencatatan tahun depan. McGuire juga menggunakan resiko sebagai variabel pengendali. Dan penelitian ini juga membuktikan bahwa resiko juga berhubungan erat dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kinerja Non-Keuangan

Meskipun teori dan riset terutama terfokus pada hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dan pengukuran kinerja keuangan, argumen tentang hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dengan pengukuran resiko finansial, seperti varians dalam *earning* dan varians dalam imbal hasil saham, juga dapat dibuat (Spicer, 1978; Ullmann, 1985; McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988). Perusahaan yang mempunyai level tanggung jawab sosial yang rendah dianggap memiliki resiko yang lebih besar, sementara perusahaan dengan level tanggung jawab sosial yang tinggi dianggap lebih tidak beresiko (McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988).

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan, antara lain penelitian Spicer (1978) yang mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki level kinerja sosial yang tinggi, ketika diukur dengan aktivitas kontrol polusi, memiliki resiko total dan resiko sistematis yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan level tanggung jawab sosial yang lebih rendah (McGuire, Sundgren & Schneeweis, 1988).

Patten (1992) menganalisis hubungan antara 3 determinan, yaitu ukuran perusahaan, industri dan profitabilitas, dengan tingkat pengungkapan CSR (Purushotaman, Tower, Hancock, & Taplin: 2002). Dimana ia menemukan hubungan yang signifikan dengan ukuran perusahaan dan industri, namun tidak untuk profitabilitas. Penelitian Hackston dan Milne (1996) juga konsisten dengan penelitian Patten untuk ukuran perusahaan, industri, dan profitabilitas. Sebagai tambahan, penelitiannya juga menyimpulkan bahwa negara pelaporan tidak mempunyai efek terhadap tingkat pengungkapan (Purushotaman, Tower, Hancock, & Taplin: 2002).

Chow & Wong-Boren (1987) and Hossain, Perera & Rahman (1995) menganalisis karakteristik spesifik perusahaan dan tingkat pengungkapan sukarela (Purushotaman, Tower, Hancock, & Taplin: 2002). Mereka menganalisis hubungan antara ukuran perusahaan, leverage, dan *assets in place*. Sebagai tambahan, studi Hossain, Perera & Rahman (1995) juga menginvestigasi hubungan antara tipe auditor, *listing status* dan tingkat pengungkapan sukarela. Dan kedua penelitian menemukan hubungan yang positif antara tingkat pengungkapan sukarela dengan ukuran perusahaan. Meskipun penelitian Chow & Wong-Boren (1987) mendeteksi hubungan *leverage* yang tidak signifikan, tetapi Hossain, Perera & Rahman (1995) menemukan hubungan yang positif.

Adapun penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara kinerja perusahaan dengan pengukuran berbasis akuntansi dan pasar saham, resiko, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan, karena penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang melihat hubungan ketika faktor spesifik perusahaan tersebut secara bersama-sama dihubungkan dengan tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan. Selain itu juga akan dilihat hubungan antara tingkat pengungkapan sosial dan karakteristik industri beserta status perusahaan. Dan untuk tingkat pengungkapan aktivitas sosial perusahaan akan digunakan hasil *content analysis* peneliti terhadap kandungan pengungkapan aktivitas sosial perusahaan dalam laporan tahunan 2006 perusahaan-perusahaan publik.